



ANALISIS TEMATIK

Semester I Tahun 2026



**Evaluasi Efisiensi Penggunaan Anggaran
Pemilihan Umum Terhadap Partisipasi Pemilih
di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024:
Penerapan *Data Envelopment Analysis***





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI
SUMATERA BARAT

Jalan Khatib Sulaiman No. 3, Padang 25138; SUREL : djpbsumbar@kemenkeu.go.id; SITUS :
www.djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sumbar

NOTA DINAS
NOMOR ND-572/WPB.03/2026

Yth. : Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Dari : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Laporan Analisis Tematik Tingkat Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat Periode Semester I Tahun 2026
Tanggal : 6 Juli 2026

Sehubungan dengan Nota Dinas Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor ND-233/PB.6/2026 tanggal 31 Maret 2026 Hal Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK-TW), Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP-TW), dan Laporan Analisis Tematik Tingkat Wilayah Tahun 2026, bersama ini disampaikan Laporan Analisis Tematik Tingkat Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat Periode Semester I Tahun 2026 dengan judul **“Evaluasi Efisiensi Penggunaan Anggaran Pemilihan Umum Terhadap Partisipasi Pemilih di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024: Penerapan *Data Envelopment Analysis*”** sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan Provinsi
Sumatera Barat



Ditandatangani secara elektronik
Mohammad Dody Fachrudin



Abstrak & Tim Penyusun

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi penggunaan anggaran Pemilu 2024 pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat terhadap tingkat partisipasi masyarakat. Analisis dilakukan menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) dengan orientasi input. Variabel input yang digunakan meliputi belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, dan belanja perjalanan dinas per pemilih aktif, sedangkan variabel output berupa tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 19 kabupaten/kota yang dianalisis, sebanyak 8 daerah telah mencapai tingkat efisiensi 100%, sedangkan 11 daerah lainnya masih menunjukkan indikasi inefisiensi. Kota Padang memiliki tingkat efisiensi terendah sebesar 43,33%, sementara sumber utama ketidakefisienan berasal dari belanja perjalanan dinas, diikuti belanja jasa dan belanja pemeliharaan. Hasil DEA juga menunjukkan bahwa beberapa daerah masih memiliki potensi penghematan anggaran tanpa mengurangi tingkat partisipasi yang telah dicapai. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan anggaran lebih berpengaruh terhadap capaian partisipasi masyarakat dibandingkan besarnya anggaran yang dialokasikan, sehingga optimalisasi penggunaan anggaran menjadi penting untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemilu.



Pengarah
M. Dody Fachrudin



Ketua
Bayu Agatyan



Desain
Riza Zulfikar



Layout
Kunandar



Editor
Dedi Setiadi



Kontributor
**Resty Famelia
Larisha**



Kontributor
**Dede Anugrah
Perdana**



Kontributor
**Marsandhi Evan Dino
Pardede**



Executive Summary

Pemilu 2024 merupakan salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan demokrasi yang memerlukan dukungan anggaran yang memadai untuk menjamin terselenggaranya seluruh tahapan pemilu serta mendorong partisipasi masyarakat. Namun, keterbatasan sumber daya publik menuntut agar anggaran yang dialokasikan dapat digunakan secara efisien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi penggunaan anggaran Pemilu 2024 pada 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dalam menghasilkan tingkat partisipasi masyarakat. Analisis dilakukan menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) dengan pendekatan input-oriented. Variabel input yang digunakan meliputi belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, dan belanja perjalanan dinas per pemilih aktif, sedangkan variabel output berupa tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2024.

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat variasi yang cukup besar dalam penggunaan anggaran per pemilih aktif antar kabupaten/kota. Wilayah perkotaan cenderung memiliki rasio belanja per pemilih aktif yang lebih tinggi dibandingkan wilayah kabupaten. Meskipun demikian, tingginya pengeluaran per pemilih aktif tidak selalu diikuti oleh tingkat partisipasi masyarakat yang lebih tinggi. Beberapa daerah mampu mencapai tingkat partisipasi yang tinggi dengan penggunaan anggaran yang relatif lebih rendah, sementara daerah lain mengeluarkan anggaran yang lebih besar tetapi menghasilkan tingkat partisipasi yang relatif sama atau bahkan lebih rendah. Kondisi ini mengindikasikan adanya perbedaan efektivitas dalam pengelolaan anggaran pemilu antar daerah.

Berdasarkan hasil DEA, sebanyak 8 kabupaten/kota telah mencapai tingkat efisiensi sebesar 100%, sementara 11 kabupaten/kota masih menunjukkan indikasi inefisiensi dengan tingkat efisiensi berkisar antara 40% hingga 95%. Kota Padang menjadi daerah dengan tingkat efisiensi terendah, diikuti Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kota Sawahlunto. Hasil ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang perbaikan dalam pengelolaan anggaran pemilu di beberapa daerah.

Executive Summary

Analisis lebih lanjut terhadap sumber inefisiensi menunjukkan bahwa belanja barang telah digunakan secara optimal oleh seluruh kabupaten/kota, yang ditunjukkan oleh tidak adanya potensi penghematan pada komponen tersebut. Sebaliknya, sumber utama ketidakefisienan berasal dari belanja perjalanan dinas, diikuti oleh belanja jasa dan belanja pemeliharaan. Kota Padang memiliki potensi penghematan terbesar, terutama pada belanja perjalanan dinas dan belanja jasa. Hasil DEA menunjukkan bahwa anggaran yang teridentifikasi tidak efisien tersebut sebenarnya masih dapat dikurangi tanpa menurunkan tingkat partisipasi masyarakat yang telah dicapai. Selain itu, beberapa daerah yang belum efisien juga memiliki potensi untuk meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat hingga mencapai tingkat optimum dengan sumber daya yang sama apabila anggaran dikelola secara lebih efektif.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar kabupaten/kota yang masih menunjukkan indikasi inefisiensi melakukan evaluasi terhadap pengelolaan belanja jasa, belanja pemeliharaan, dan terutama belanja perjalanan dinas. Optimalisasi dapat dilakukan melalui penyusunan anggaran yang lebih berbasis kebutuhan riil, peningkatan pemanfaatan teknologi untuk koordinasi kegiatan, pengendalian biaya operasional, serta penerapan praktik pengelolaan anggaran yang telah berhasil diterapkan oleh daerah-daerah yang efisien. Dengan demikian, anggaran pemilu dapat dimanfaatkan secara lebih efektif untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu dan mendorong partisipasi masyarakat secara optimal tanpa memerlukan tambahan anggaran yang signifikan.

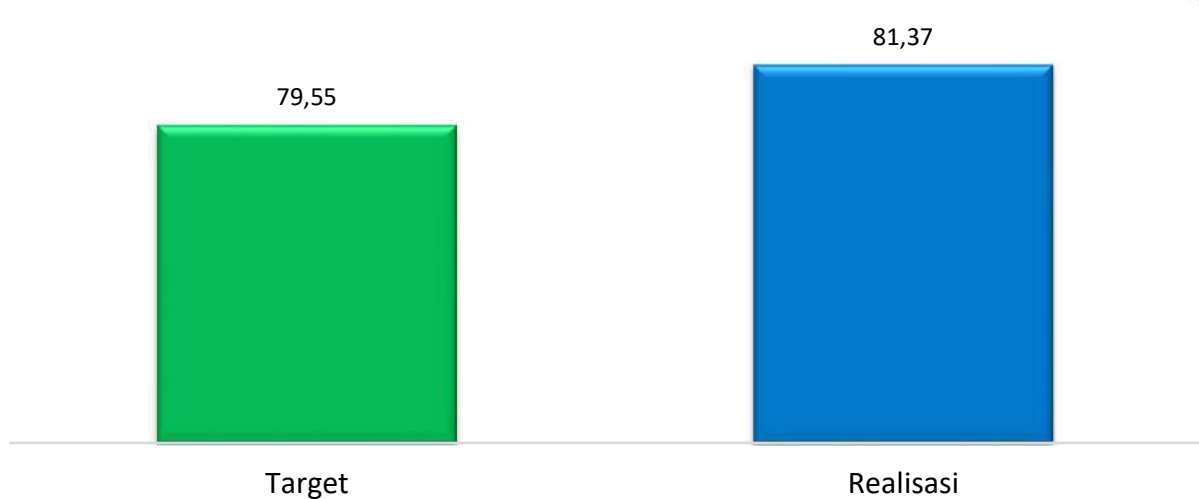
Evaluasi Efisiensi Penggunaan Anggaran Pemilihan Umum Terhadap Partisipasi Pemilih di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024: Penerapan *Data Envelopment Analysis*

A. Pendahuluan

Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi di Indonesia (Ofis Rikardo, 2020). Melalui pemilihan umum, masyarakat diberikan hak untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat yang akan menjalankan pemerintahan. Pelaksanaan pemilu di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Regulasi tersebut mengatur berbagai tahapan penyelenggaraan pemilu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penetapan hasil pemilu (Hartono et al., 2023). Keberadaan aturan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pemilu mampu menghasilkan pemerintahan yang memperoleh dukungan dan kepercayaan dari masyarakat. Untuk mengetahui apakah tujuan tersebut tercapai, diperlukan indikator yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan pemilu.

Salah satu indikator yang paling sering digunakan untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan pemilu adalah tingkat partisipasi pemilih (Wijayanti, 2024). Tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kemauan untuk terlibat dalam proses demokrasi. Partisipasi yang tinggi juga mencerminkan legitimasi yang kuat terhadap hasil pemilu, menghasilkan representasi politik yang lebih baik, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pemilu dapat memperkuat fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan yang terbentuk. Oleh karena itu, tingkat partisipasi pemilih menjadi salah satu ukuran penting dalam mengevaluasi kualitas penyelenggaraan pemilu. Pentingnya indikator tersebut dapat dilihat dari capaian partisipasi pemilih pada Pemilu Tahun 2024.

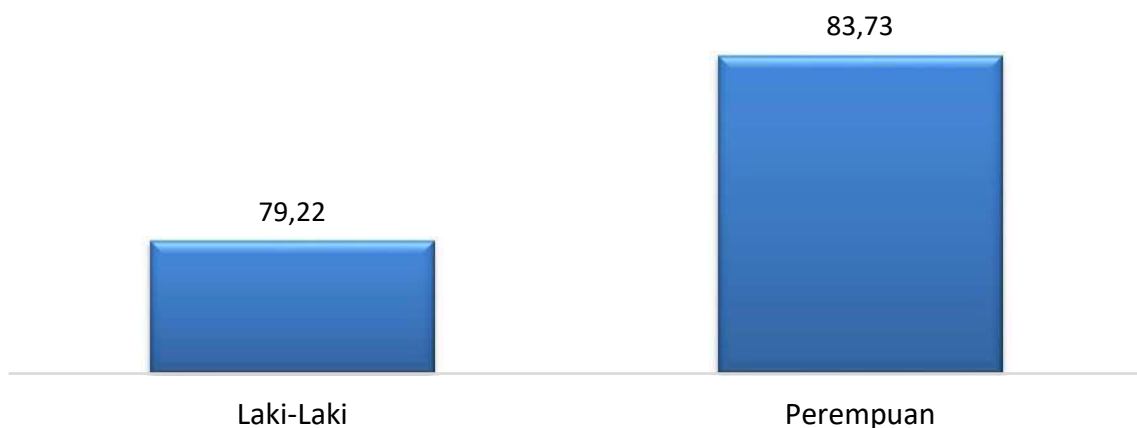
Secara nasional, tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu Tahun 2024 menunjukkan hasil yang cukup baik. Komisi Pemilihan Umum mencatat, sebagaimana terlihat pada grafik 1, tingkat partisipasi pemilih mencapai 81,37 persen atau melampaui target RPJMN 2020-2024 sebesar 79,55 persen. Dengan capaian tersebut, tingkat keberhasilan partisipasi pemilih mencapai 102,35 persen dari target yang ditetapkan. Meskipun demikian, capaian nasional sering kali menutupi variasi yang terjadi pada kelompok pemilih tertentu. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih rinci untuk melihat kondisi partisipasi berdasarkan karakteristik pemilih.



Grafik 1. Target dan Realisasi Partisipasi Pemilihan Umum Indonesia Tahun 2024

Sumber: Portal Data KPU (data diolah)

Salah satu karakteristik yang dapat digunakan untuk melihat variasi partisipasi pemilih adalah jenis kelamin. Pada grafik 2 terlihat bahwa tingkat partisipasi pemilih laki-laki tercatat sebesar 79,22 persen, sedangkan partisipasi pemilih perempuan mencapai 83,73 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih laki-laki masih berada di bawah target partisipasi RPJMN 2020-2024 yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi pemilih laki-laki masih perlu mendapat perhatian. Namun demikian, kondisi tersebut tidak terjadi secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

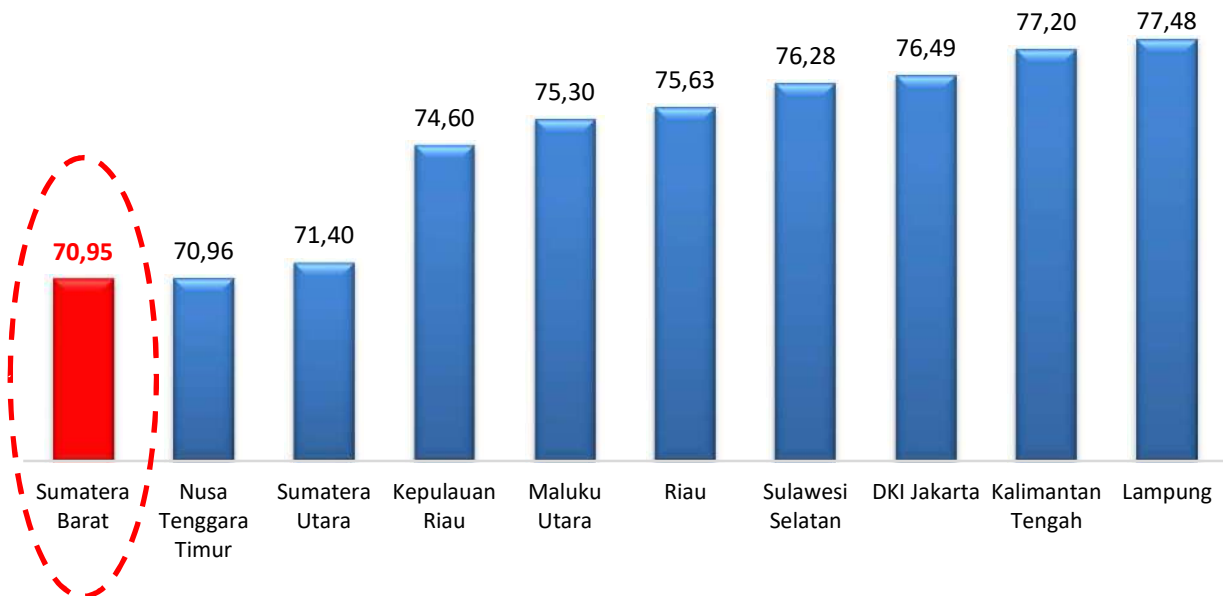


Grafik 2. Tingkat Partisipasi Pemilihan Umum Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024

Sumber: Portal Data KPU (data diolah)

Perbedaan tingkat partisipasi pemilih laki-laki terlihat cukup jelas ketika dianalisis berdasarkan provinsi. Berdasarkan grafik 3, Provinsi Sumatera Barat memiliki tingkat partisipasi pemilih laki-laki terendah di Indonesia, yaitu sebesar 70,95 persen. Angka

tersebut berada jauh di bawah rata-rata nasional partisipasi pemilih laki-laki yang mencapai 79,22 persen dan belum mencapai target RPJMN 2020-2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan partisipasi pemilih di Sumatera Barat masih menghadapi tantangan yang cukup besar. Rendahnya partisipasi tersebut menjadi perhatian karena dapat memengaruhi kualitas demokrasi yang dihasilkan.



Grafik 3. Tingkat Partisipasi Laki-Laki pada Pemilu Tahun 2024 Berdasarkan Provinsi
Sumber: Portal Data KPU (data diolah)

Dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, Provinsi Sumatera Barat memperoleh alokasi belanja barang dan jasa sekitar Rp1,45 triliun yang bersumber dari APBN. Anggaran belanja pemilu digunakan untuk mendukung berbagai tahapan penyelenggaraan pemilu, seperti pemutakhiran data pemilih, pengadaan dan distribusi logistik, serta pelaksanaan pemungutan suara yang diharapkan dapat mendorong peningkatan tingkat partisipasi pemilih (Hayati, 2020). Namun demikian, tingkat partisipasi pemilih laki-laki di Sumatera Barat masih belum mencapai target RPJMN 2020-2024 dan menjadi yang paling rendah dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia sehingga menunjukkan bahwa output yang dihasilkan belum sesuai dengan harapan. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kemungkinan bahwa anggaran yang telah dialokasikan belum dimanfaatkan secara optimal dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Optimalisasi penggunaan anggaran dapat ditinjau melalui tingkat efisiensi penggunaannya, karena semakin efisien suatu anggaran dalam menghasilkan output yang diharapkan, maka semakin optimal pula pemanfaatan anggaran tersebut.

Evaluasi terhadap penggunaan anggaran dapat dilakukan melalui pendekatan efisiensi. Semakin efisien suatu anggaran dalam menghasilkan output yang diharapkan, maka semakin optimal pula pemanfaatan sumber daya yang digunakan. Salah satu metode yang banyak digunakan untuk mengukur efisiensi adalah *Data Envelopment Analysis* (DEA). Metode ini membandingkan hubungan antara input dan output pada sejumlah unit yang memiliki karakteristik yang sama (Coelli et al., 2005). Dalam penelitian ini, anggaran pemilu diperlakukan sebagai input, sedangkan tingkat partisipasi pemilih digunakan sebagai output. Hasil pengukuran DEA dapat memberikan gambaran mengenai tingkat efisiensi penggunaan anggaran pemilu di Sumatera Barat.

Peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang membahas terkait efisiensi penggunaan anggaran menggunakan DEA. Pardede (2025) membahas terkait efisiensi anggaran pengendalian inflasi di Sumatera Barat tahun 2024, Rahayu & Khoirunurrofik (2022) terkait efisiensi belanja APBD di 228 Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2014-2018, Saputra & Khoirunurrofik (2022) terkait efisiensi belanja daerah bidang Pendidikan di Indonesia tahun 2016-2019, Rahmawati & Muhsyaf (2025) terkait tingkat efisiensi belanja bidang Pendidikan dan Kesehatan di Indonesia tahun 2021-2023, Risdiyanti & Firdarini (2026) terkait tingkat efisiensi belanja modal pada Dinas Pariwisata di Kabupaten Bantul tahun 2019-2024. Rambe et al. (2020) terkait tingkat efisiensi belanja Pemerintah Daerah di Pulau Sumatera tahun 2016, Putra et al. (2018) terkait tingkat efisiensi belanja Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh tahun 2011-2015, Rambe (2020) terkait belanja Pemerintah Daerah di Indonesia tahun 2015-2018, Afonso & Fraga (2024) terkait tingkat efisiensi belanja publik di Amerika Latin tahun 2000-2019, dan Dutu & Sicari (2020) terkait tingkat efisiensi belanja publik (Kesehatan, Pendidikan, dan administrasi pemerintah) di negara OECD tahun 2012. Semua penelitian terdahulu tersebut membahas terkait efisiensi belanja Pendidikan, Kesehatan, Modal, Administrasi Umum, dan pengendalian Inflasi. Namun, penelitian yang membahas terkait tingkat efisiensi penggunaan anggaran pemilu di Indonesia masih sangat terbatas, terutama untuk lokasi penelitian di Provinsi Sumatera Barat. Ini menimbulkan *empirical gap* yang perlu dibahas pada penelitian-penelitian berikutnya.

Berdasarkan latar belakang, permasalahan, dan *empirical gap* tersebut, peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti terkait tingkat efisiensi belanja pemilu di Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 menggunakan DEA. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efisiensi penggunaan anggaran Pemilu Tahun 2024 terhadap tingkat partisipasi pemilih di Provinsi Sumatera Barat menggunakan Data Envelopment Analysis.

B. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam kajian tematik ini adalah *Data Envelopment Analysis* (DEA). Metode ini menggunakan pemrograman linear untuk membentuk suatu batas kinerja terbaik (*efficient frontier*) berdasarkan data yang diamati (Coelli et al., 2005). Batas tersebut dibentuk dari unit-unit yang memiliki kinerja paling baik tanpa harus menentukan bentuk hubungan matematis tertentu terlebih dahulu. Selanjutnya, tingkat efisiensi setiap unit diukur dengan membandingkan posisinya terhadap batas kinerja terbaik tersebut.

Variabel yang digunakan dalam kajian ini adalah variabel input belanja untuk kegiatan Pemilu tahun 2024 meliputi belanja barang (521), belanja jasa (522), belanja pemeliharaan (523), dan belanja perjalanan dinas (524). Sedangkan variabel output yang digunakan adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu. Penelitian ini berlokasi di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024. Sumber data berasal dari aplikasi SINTESA untuk data anggaran belanja pemilu dan portal data KPU untuk data partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilu. *Software* yang digunakan dalam penelitian ini adalah R-STUDIO.

Tahapan untuk melakukan analisis dalam kajian tematik ini adalah menghitung rasio semua variabel input terhadap jumlah pemilih agar data yang diperoleh *apple-to-apple* dimasing-masing Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya adalah menghitung tingkat efisiensi penggunaan seluruh variabel rasio input terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu diseluruh Kabupaten/Kota. Rumus untuk mendapatkan angka tingkat efisiensi tersebut mengikuti rumus berikut:

Fungsi Objektif:

$$\text{Max } E = \mu_0 + \mu Y \dots\dots\dots 1)$$

Fungsi Subjek:

$$\vartheta_1 X_1 + \vartheta_2 X_2 + \vartheta_3 X_3 + \vartheta_4 X_4 = 1 \dots\dots\dots 2)$$

$$\mu Y - (\vartheta_1 X_1 + \vartheta_2 X_2 + \vartheta_3 X_3 + \vartheta_4 X_4) \leq 0 \dots\dots\dots 3)$$

$$\mu \geq 0 \quad \vartheta_{1,2,3} \geq 0 \dots\dots\dots 4)$$

dimana Y = tingkat partisipasi masyarakat pada pemilu 2024; X_1 = belanja barang; X_2 = belanja jasa; X_3 = belanja pemeliharaan; X_4 = belanja perjalanan dinas; E = skor efisiensi; μ =

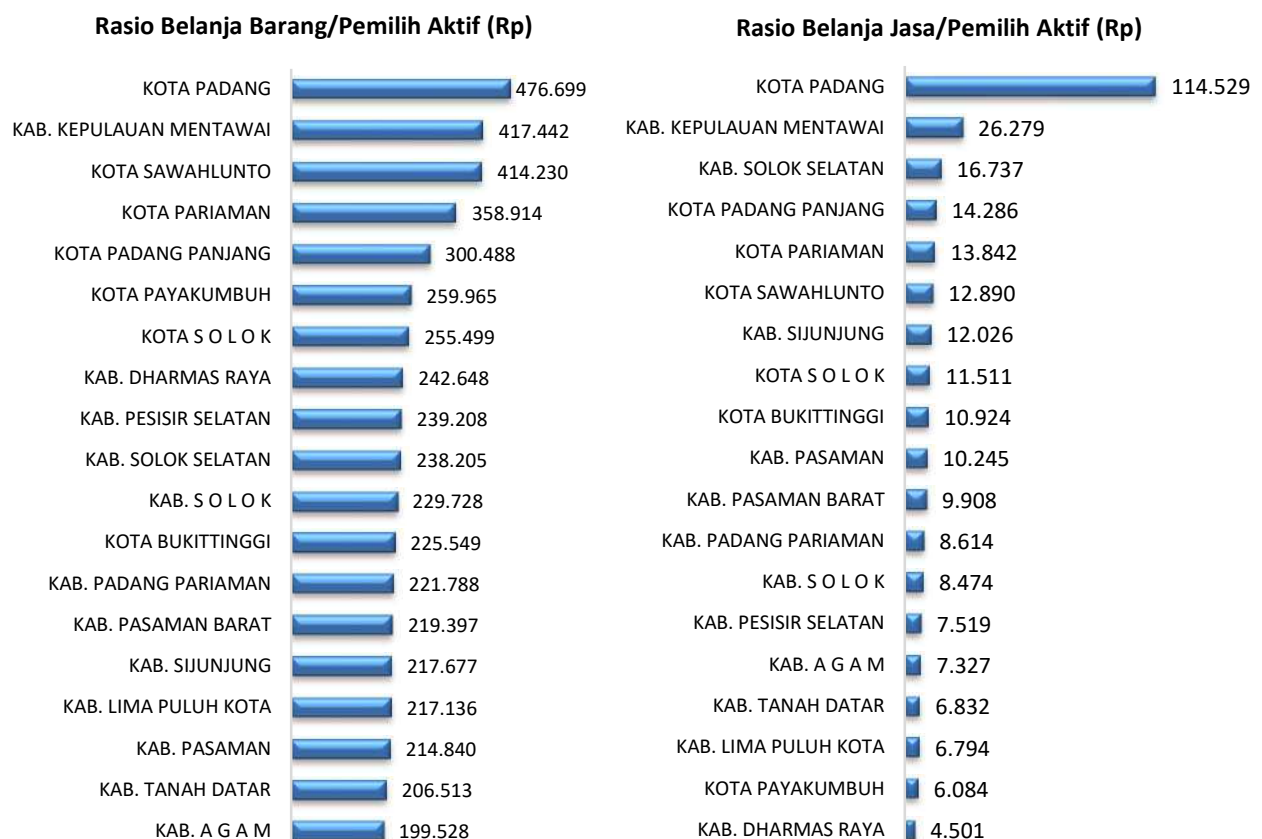
nilai untuk output Y ; $\theta_{1,2,3}$ = nilai untuk input $X_{1,2,3}$; dan μ_0 = intersep.

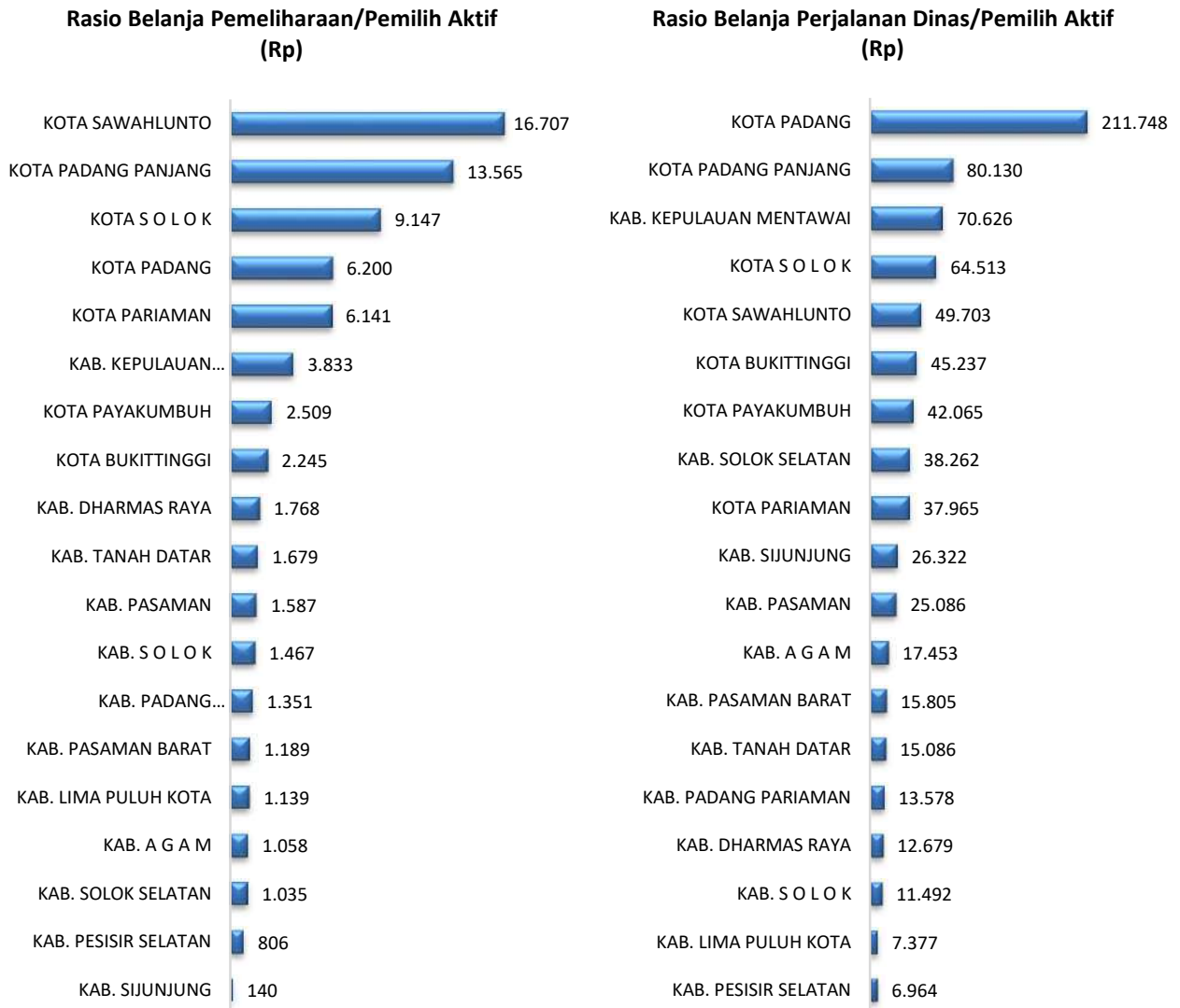
Tahapan selanjutnya adalah menghitung *slack* untuk mengukur pada anggaran belanja pemilu mana saja yang terindikasi tidak efisien pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. *Slack input* (kelebihan penggunaan input) dianggap nol jika tidak ada selisih antara input yang seharusnya digunakan dengan input yang benar-benar dipakai pada kondisi optimal.

Tahapan terakhir adalah menghitung *maximum output* guna mengukur tingkat optimum partisipasi masyarakat dalam pemilu dengan anggaran yang disediakan. Angka ini dapat memberikan gambaran apakah tingkat partisipasi saat ini sudah paling maksimum atau masih dapat ditingkatkan lebih lanjut.

C. Hasil dan Pembahasan

Tahapan pertama adalah melakukan analisis deskriptif pada variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel-variabel tersebut adalah rasio belanja barang, jasa, pemeliharaan, dan perjalanan dinas terhadap total jumlah pemilih aktif, beserta tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilu di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2024.





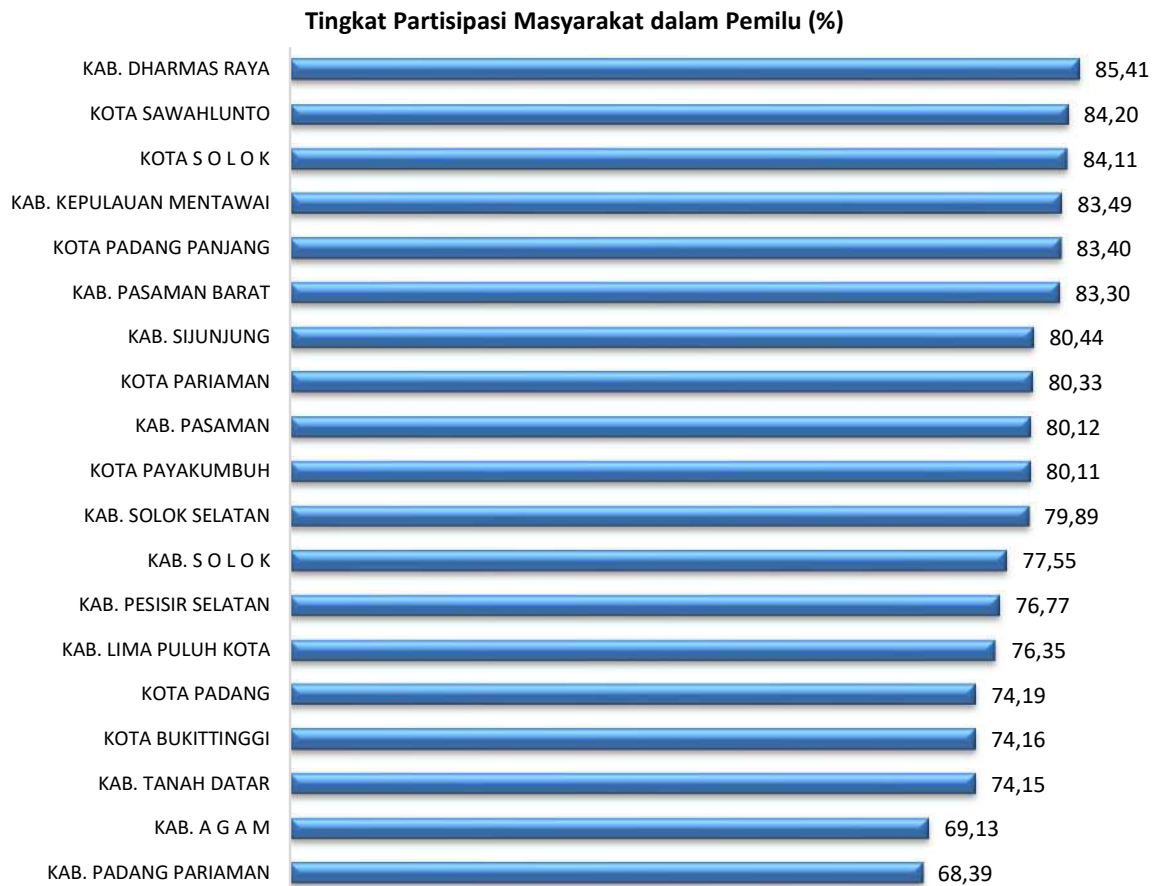
Grafik 4. Rasio Belanja Barang, Jasa, Pemeliharaan, dan Perjalanan Dinas terhadap Jumlah Pemilih Aktif per Kab/Kota di Sumatera Barat tahun 2024

Sumber: SINTESA dan Portal Data KPU (data diolah)

Berdasarkan grafik 4, rasio belanja terhadap jumlah pemilih aktif, terlihat bahwa belanja barang per pemilih aktif merupakan komponen dengan nilai terbesar dibandingkan komponen belanja lainnya. Belanja barang pada penyelenggaraan pemilu umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional, seperti pengadaan perlengkapan kantor, bahan habis pakai, perlengkapan pemungutan suara, serta kebutuhan logistik pendukung tahapan pemilu. Dengan demikian, rasio belanja barang per pemilih aktif dapat menggambarkan besarnya alokasi anggaran yang secara relatif digunakan untuk menyediakan sarana dan kebutuhan operasional dalam melayani setiap pemilih aktif selama proses penyelenggaraan pemilu. Kota Padang mencatat rasio tertinggi sebesar Rp476.699,00 per pemilih aktif, diikuti Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar Rp417.442,00 dan Kota

Sawahlunto sebesar Rp414.230,00. Sementara itu, Kabupaten Agam memiliki rasio terendah sebesar Rp199.528,00 per pemilih aktif. Pola yang relatif serupa juga terlihat pada belanja jasa per pemilih aktif, yang mencakup pengeluaran untuk tenaga pendukung, jasa profesional, sewa fasilitas, hingga berbagai layanan penunjang penyelenggaraan pemilu. Rasio ini menunjukkan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk mendukung layanan dan aktivitas yang diperlukan agar setiap pemilih aktif dapat terlayani dalam setiap tahapan pemilu. Kota Padang kembali menempati posisi tertinggi dengan rasio Rp114.529,00 per pemilih aktif, sedangkan Kabupaten Dharmasraya mencatat rasio terendah sebesar Rp4.501,00. Secara umum, daerah dengan rasio belanja barang dan jasa yang tinggi didominasi oleh wilayah kota. Hal ini mengindikasikan bahwa dukungan anggaran yang dialokasikan untuk menunjang pelayanan dan penyelenggaraan pemilu bagi setiap pemilih aktif cenderung lebih besar pada wilayah perkotaan dibandingkan wilayah Kabupaten.

Pada komponen belanja pemeliharaan per pemilih aktif, yang digunakan untuk menjaga kondisi sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pemilu agar tetap berfungsi secara optimal, Kota Sawahlunto mencatat rasio tertinggi sebesar Rp16.707,00 per pemilih aktif, diikuti Kota Padang Panjang sebesar Rp13.565 dan Kota Solok sebesar Rp9.147,00. Rasio ini mencerminkan besarnya anggaran yang dialokasikan untuk memastikan fasilitas dan aset pendukung pemilu tetap siap digunakan dalam memberikan pelayanan kepada pemilih aktif. Sementara itu, Kabupaten Sijunjung memiliki rasio terendah sebesar Rp140,00 per pemilih aktif. Pada komponen belanja perjalanan dinas per pemilih aktif, yang digunakan untuk mendukung koordinasi, supervisi, monitoring, distribusi logistik, dan pelaksanaan tahapan pemilu di lapangan, Kota Padang mencatat rasio tertinggi sebesar Rp211.748,00 per pemilih aktif, disusul Kota Padang Panjang sebesar Rp80.130,00 dan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar Rp70.626,00. Rasio ini menggambarkan besarnya biaya mobilitas yang dikeluarkan untuk memastikan setiap tahapan pemilu dapat terlaksana dan menjangkau seluruh pemilih aktif secara efektif. Sebaliknya, Kabupaten Pesisir Selatan memiliki rasio terendah sebesar Rp6.964,00. Secara keseluruhan, wilayah kota cenderung memiliki rasio belanja per pemilih aktif yang lebih tinggi dibandingkan wilayah Kabupaten. Temuan ini menunjukkan bahwa setiap pemilih aktif di wilayah perkotaan secara relatif didukung oleh alokasi anggaran yang lebih besar untuk menunjang kelancaran layanan, operasional, dan pelaksanaan tahapan pemilu, sehingga kebutuhan penyelenggaraan pemilu bagi setiap pemilih dapat terpenuhi secara optimal.



Grafik 5. Tingkat Partisipasi Pemilih Aktif dalam Pemilu per Kab/Kota di Sumatera Barat tahun 2024
Sumber: Portal Data KPU (data diolah)

Berdasarkan grafik 5 diatas, tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2024 di Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat berada pada rentang 65%–90%. Kabupaten Dharmasraya mencatat partisipasi tertinggi sebesar 85,49%, diikuti Kota Sawahlunto (84,20%) dan Kota Solok (84,11%). Sebaliknya, Kabupaten Padang Pariaman memiliki tingkat partisipasi terendah sebesar 68,39%, disusul Kabupaten Agam (69,13%). Secara umum, sebagian besar wilayah (57,89% dari total) telah mencapai target tingkat partisipasi dalam RPJMN 2020-2024 yang di atas 79,55%.

Jika dikaitkan dengan rasio belanja per pemilih aktif pada grafik 4, terlihat bahwa besarnya anggaran yang dikeluarkan untuk mendukung setiap pemilih aktif tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat partisipasi yang dihasilkan. Kota Padang, misalnya, memiliki rasio belanja barang, jasa, dan perjalanan dinas per pemilih aktif tertinggi, namun tingkat partisipasinya hanya 74,19%, lebih rendah dibandingkan beberapa daerah lain yang mengeluarkan anggaran relatif lebih kecil. Sebaliknya, Kabupaten Dharmasraya mampu mencapai tingkat partisipasi tertinggi meskipun rasio belanja per pemilih aktifnya tidak

termasuk yang tertinggi. Sementara itu, Kota Sawahlunto menunjukkan kombinasi yang lebih seimbang, dengan rasio belanja per pemilih aktif yang relatif tinggi dan tingkat partisipasi yang juga tinggi. Temuan ini mengindikasikan adanya perbedaan kemampuan antar daerah dalam mengonversi anggaran pemilu menjadi capaian partisipasi masyarakat. Beberapa daerah mampu mencapai tingkat partisipasi yang tinggi dengan rasio belanja per pemilih aktif yang relatif rendah, sementara daerah lain mengeluarkan anggaran yang lebih besar namun menghasilkan tingkat partisipasi yang tidak jauh berbeda atau bahkan lebih rendah. Kondisi tersebut memberikan indikasi awal adanya ketidakefisienan dalam pengelolaan anggaran pemilu, yaitu ketika tambahan anggaran yang dikeluarkan belum mampu menghasilkan peningkatan partisipasi masyarakat yang sebanding.

Tahapan berikutnya adalah mengukur tingkat efisiensi penggunaan anggaran pemilu pada setiap Kabupaten/kota menggunakan DEA. Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui apakah anggaran yang telah dikeluarkan telah menghasilkan tingkat partisipasi masyarakat yang optimal. Hasil pengukuran tersebut tersaji pada tabel 1 berikut.

No	Kabupaten/kota	Tingkat Efisiensi
1.	Kabupaten Agam	100%
2.	Kabupaten Dharmasraya	100%
3.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	53.06%
4.	Kabupaten Lima Puluh Kota	100%
5.	Kabupaten Padang Pariaman	93.69%
6.	Kabupaten Pasaman	100%
7.	Kabupaten Pasaman Barat	100%
8.	Kabupaten Pesisir Selatan	100%
9.	Kabupaten Solok	93.88%
10.	Kabupaten Sijunjung	100%
11.	Kabupaten Solok Selatan	90,31%
12.	Kabupaten Tanah Datar	100%
13.	Kota Bukittinggi	91,57%
14.	Kota Padang	43,33%
15.	Kota Padang Panjang	73,38%
16.	Kota Pariaman	60,46%
17.	Kota Payakumbuh	88,19%
18.	Kota Solok	89,36%
19.	Kota Sawahlunto	55,70%

Tabel 1. Tingkat Efisiensi Belanja Pemilu 2024 Menurut Kab/Kota di Sumatera Barat

Sumber: R-Studio (hasil pengolahan)

Berdasarkan hasil analisis DEA, terdapat 8 Kabupaten/kota yang telah mencapai tingkat efisiensi sebesar 100%, yaitu Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan,

Kabupaten Sijunjung, dan Kabupaten Tanah Datar. Nilai efisiensi 100% menunjukkan bahwa daerah-daerah tersebut telah mampu memanfaatkan anggaran pemilu secara optimal untuk menghasilkan tingkat partisipasi masyarakat yang dicapai. Dengan kata lain, berdasarkan perbandingan terhadap daerah lain dalam sampel, tidak terdapat pengurangan input yang dapat dilakukan tanpa menurunkan output yang dihasilkan. Menariknya, beberapa daerah efisien seperti Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Pasaman Barat mampu mencapai tingkat partisipasi yang tinggi meskipun rasio belanja per pemilih aktif tidak termasuk yang tertinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingginya partisipasi masyarakat tidak selalu memerlukan pengeluaran anggaran yang besar per pemilih aktif, melainkan dipengaruhi oleh kemampuan daerah dalam mengelola dan memanfaatkan anggaran secara efektif.

Sebaliknya, terdapat 11 Kabupaten/kota yang belum mencapai kondisi efisien, dengan tingkat efisiensi berkisar antara 43,33% hingga 93,69%. Kota Padang menjadi daerah dengan tingkat efisiensi terendah, yaitu 43,33%, diikuti Kabupaten Kepulauan Mentawai (53,06%) dan Kota Sawahlunto (55,70%). Hasil ini sejalan dengan analisis deskriptif sebelumnya yang menunjukkan bahwa daerah-daerah tersebut memiliki rasio belanja per pemilih aktif yang relatif tinggi pada beberapa komponen belanja. Kota Padang, misalnya, mencatat rasio belanja barang, jasa, dan perjalanan dinas per pemilih aktif tertinggi dibandingkan daerah lain, namun tingkat partisipasi masyarakat yang dihasilkan hanya sebesar 74,19%, lebih rendah dibandingkan beberapa daerah yang memiliki anggaran per pemilih aktif lebih kecil. Fenomena serupa juga terlihat pada Kepulauan Mentawai dan Kota Sawahlunto yang mengalokasikan anggaran relatif besar untuk mendukung setiap pemilih aktif, tetapi belum mampu menghasilkan output partisipasi yang sebanding dengan daerah-daerah yang efisien. Temuan ini mengindikasikan adanya alokasi anggaran pada daerah yang belum efisien, sehingga tingkat partisipasi masyarakat yang sama dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya yang lebih optimal. Dengan demikian, hasil DEA menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada besarnya anggaran yang dialokasikan, melainkan pada kemampuan masing-masing daerah dalam mengonversi anggaran menjadi capaian partisipasi masyarakat yang maksimal.

Tahapan berikutnya adalah slack untuk mengukur pada anggaran belanja pemilu mana saja yang terindikasi tidak efisien pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Hasil pengukurannya tersaji pada tabel 2 berikut.

Kab/Kota	Belanja Barang	Belanja Jasa	Belanja Pemeliharaan	Belanja Perjalanan Dinas
Kabupaten Agam	0	0	0	0
Kabupaten Dharmasraya	0	0	0	0
Kabupaten Kepulauan Mentawai	0	299.080.967	52.433.023	1.451.518.985
Kabupaten Lima Puluh Kota	0	0	0	0
Kabupaten Padang Pariaman	0	324.410.443	55.406.249	0
Kabupaten Pasaman	0	0	0	0
Kabupaten Pasaman Barat	0	0	0	0
Kabupaten Pesisir Selatan	0	0	0	0
Kabupaten Solok	0	123.658.707	35.982.892	0
Kabupaten Sijunjung	0	0	0	0
Kabupaten Solok Selatan	0	679.977.178	0	2.088.314.309
Kabupaten Tanah Datar	0	0	0	0
Kota Bukittinggi	0	300.926.346	35.832.080	2.502.159.338
Kota Padang	0	28.495.457.508	671.514.086	51.032.465.763
Kota Padang Panjang	0	36.162.240	379.956.152	1.875.920.446
Kota Pariaman	0	0	165.151.129	550.011.098
Kota Payakumbuh	0	0	48.928.470	2.410.626.304
Kota Solok	0	137.024.569	377.605.774	2.403.355.438
Kota Sawahlunto	0	0	386.682.689	664.400.833

Tabel 2. *Slack Input* Belanja Pemilu 2024 Menurut Kab/Kota di Sumatera Barat

Sumber: R-Studio (hasil pengolahan)

Hasil analisis pada tabel 2 menunjukkan bahwa seluruh Kabupaten/kota memiliki nilai inefisiensi nol pada komponen belanja barang, yang berarti penggunaan anggaran pada komponen ini telah optimal dan tidak terdapat anggaran yang dapat dikurangi tanpa menurunkan tingkat partisipasi masyarakat yang dicapai. Sebaliknya, potensi inefisiensi masih ditemukan pada belanja jasa, belanja pemeliharaan, dan belanja perjalanan dinas. Pada belanja jasa, Kota Padang memiliki potensi penghematan terbesar sebesar Rp28,50 miliar, diikuti Kota Solok sebesar Rp679,98 juta dan Kabupaten Padang Pariaman sebesar Rp324,41 juta. Pada belanja pemeliharaan, potensi penghematan terbesar juga terdapat di Kota Padang sebesar Rp671,51 juta, diikuti Kota Solok sebesar Rp428,93 juta dan Kota Sawahlunto sebesar Rp387,61 juta. Sementara itu, pada belanja perjalanan dinas, beberapa daerah masih menunjukkan kelebihan penggunaan anggaran yang cukup besar meskipun tingkat partisipasi yang dicapai dapat dipertahankan pada tingkat yang sama. Dengan demikian, nilai inefisiensi yang teridentifikasi pada ketiga komponen tersebut menunjukkan

besarnya anggaran yang masih dapat dihemat tanpa mengurangi capaian partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2024.

Jika dibandingkan antar komponen belanja, sumber potensi penghematan terbesar berasal dari belanja perjalanan dinas. Kota Padang mencatat potensi inefisiensi perjalanan dinas sebesar Rp51,03 miliar, jauh lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya, yang sekaligus menjelaskan mengapa Kota Padang memperoleh tingkat efisiensi terendah sebesar 43,33%. Potensi inefisiensi perjalanan dinas yang cukup besar juga ditemukan pada Kota Bukittinggi sebesar Rp2,50 miliar, Kota Solok sebesar Rp2,09 miliar, Kota Padang Panjang sebesar Rp1,88 miliar, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar Rp1,45 miliar. Temuan ini menunjukkan bahwa pengeluaran untuk mobilitas, koordinasi, supervisi, dan kegiatan lapangan masih menjadi komponen yang paling berkontribusi terhadap ketidakefisienan penggunaan anggaran pemilu. Sebaliknya, daerah yang memperoleh tingkat efisiensi 100%, seperti Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Tanah Datar, dan Kota Payakumbuh, tidak memiliki potensi inefisiensi pada seluruh komponen belanja. Artinya, tingkat partisipasi masyarakat yang dicapai oleh daerah-daerah tersebut telah dihasilkan dengan penggunaan anggaran yang optimal tanpa adanya kelebihan alokasi pada belanja barang, jasa, pemeliharaan, maupun perjalanan dinas. Oleh karena itu, upaya peningkatan efisiensi anggaran pemilu di Kabupaten/kota yang belum efisien perlu difokuskan terutama pada pengendalian belanja perjalanan dinas, karena komponen inilah yang memberikan kontribusi terbesar terhadap potensi penghematan anggaran.

Tahapan terakhir adalah menghitung *optimum output* untuk mengetahui besaran output tertinggi yang bisa diperoleh jika anggaran yang tidak efisien tersebut dapat dikelola atau dioptimalkan lebih baik lagi. Hasil pengukuran *maximum output* tersaji pada tabel 3 berikut.

Kab/Kota	Realisasi Partisipasi (%)	Optimum Partisipasi (%)
Kabupaten Agam	69,13	69,13
Kabupaten Dharmasraya	85,41	85,41
Kabupaten Kepulauan Mentawai	83,49	85,79
Kabupaten Lima Puluh Kota	76,35	76,35
Kabupaten Padang Pariaman	68,39	88,35
Kabupaten Pasaman	80,12	80,12
Kabupaten Pasaman Barat	83,30	83,30
Kabupaten Pesisir Selatan	76,77	76,77
Kabupaten Solok	77,55	83,26
Kabupaten Sijunjung	80,44	80,44
Kabupaten Solok Selatan	79,89	84,00

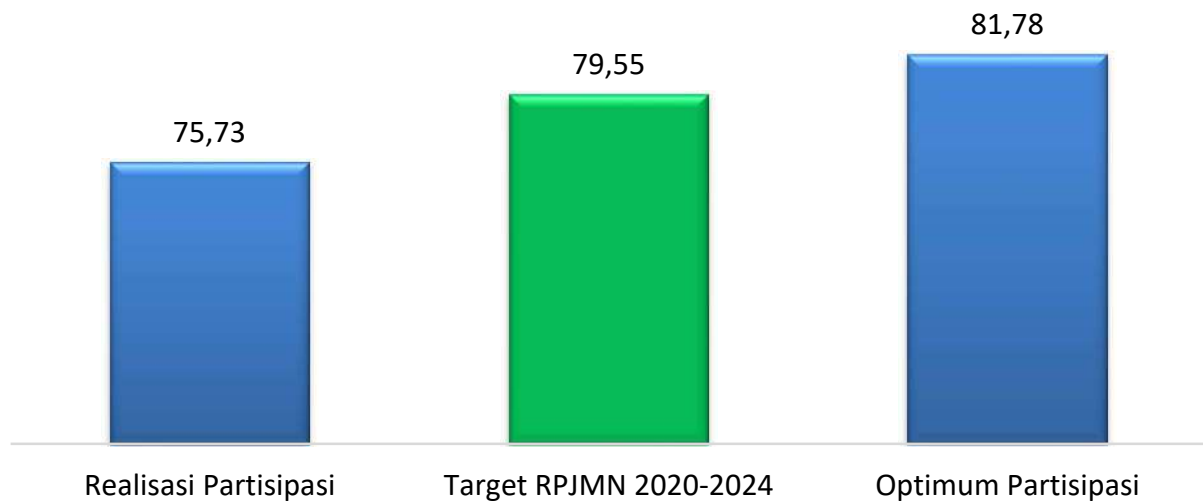
Kab/Kota	Realisasi Partisipasi (%)	Optimum Partisipasi (%)
Kabupaten Tanah Datar	74,15	74,15
Kota Bukittinggi	74,16	87,23
Kota Padang	74,19	89,31
Kota Padang Panjang	83,40	85,81
Kota Pariaman	80,33	86,66
Kota Payakumbuh	80,11	86,73
Kota Solok	84,11	85,65
Kota Sawahlunto	84,20	85,64

Tabel 3. *Optimum Output* Partisipasi Pemilu 2024 Menurut Kab/Kota di Sumatera Barat

Sumber: R-Studio (hasil pengolahan)

Tabel 3 menunjukkan perbandingan antara realisasi tingkat partisipasi masyarakat dengan tingkat partisipasi optimum yang diperoleh dari hasil analisis DEA. Pada daerah yang telah mencapai efisiensi 100%, seperti Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, dan Kabupaten Tanah Datar, nilai realisasi partisipasi sama dengan nilai partisipasi optimum, yang menunjukkan bahwa daerah tersebut telah mampu memanfaatkan anggaran pemilu secara optimal untuk menghasilkan tingkat partisipasi yang dicapai. Sebaliknya, daerah yang belum efisien masih memiliki selisih antara realisasi dan partisipasi optimum, yang menunjukkan adanya potensi peningkatan partisipasi masyarakat tanpa perlu menambah anggaran atau memanfaatkan lebih baik lagi anggaran yang tidak efisien tersebut. Kota Padang memiliki selisih terbesar, dengan realisasi partisipasi sebesar 74,19% dan partisipasi optimum sebesar 89,31%, sehingga masih terdapat potensi peningkatan sebesar 15,12 poin persentase. Selisih yang cukup besar juga terlihat pada Kota Bukittinggi (13,07 poin persentase), Kota Payakumbuh (6,67 poin persentase), dan Kota Pariaman (6,33 poin persentase). Temuan ini menunjukkan bahwa beberapa kabupaten/kota sebenarnya masih dapat meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat melalui pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan efisien, tanpa harus menambah jumlah anggaran yang digunakan.

Sebagai tambahan sebagaimana terlihat pada grafik 6, jika anggaran yang tidak efisien pada masing-masing Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat dapat lebih dioptimalkan lagi, capaian realisasi partisipasi pemilih aktif dalam Pemilu 2024 dapat mencapai 81,78%. Angka ini lebih besar dari realisasi sebesar 75,73%, bahkan melebihi target RPJMN 2020-2024. Artinya, angka realisasi yang berada dibawah target tersebut sebenarnya bisa melebihi target jika anggaran yang tidak efisien tersebut dapat dioptimalkan lebih baik lagi.



Grafik 5. Tingkat Partisipasi Pemilih Aktif dalam Pemilu per Kab/Kota di Sumatera Barat tahun 2024
Sumber: Portal Data KPU (data diolah)

D. Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis menggunakan *Data Envelopment Analysis* (DEA), efisiensi penggunaan anggaran Pemilu 2024 pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat menunjukkan hasil yang beragam. Sebanyak delapan daerah telah mencapai tingkat efisiensi 100%, yang menandakan bahwa anggaran yang digunakan telah optimal dalam menghasilkan tingkat partisipasi masyarakat yang dicapai. Sementara itu, daerah lainnya masih mengalami inefisiensi dengan tingkat efisiensi berkisar antara 40% hingga 95%. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa sumber utama ketidakefisienan berasal dari komponen belanja perjalanan dinas, belanja jasa, dan belanja pemeliharaan, sedangkan belanja barang telah digunakan secara optimal pada seluruh daerah. Hasil DEA juga mengindikasikan bahwa daerah yang belum efisien masih memiliki potensi untuk menghemat anggaran tanpa mengurangi tingkat partisipasi masyarakat yang telah dicapai, atau sebaliknya meningkatkan partisipasi masyarakat hingga mencapai tingkat optimum dengan anggaran yang sama. Temuan ini menunjukkan bahwa tingginya anggaran per pemilih aktif tidak selalu menghasilkan tingkat partisipasi yang lebih tinggi, sehingga efektivitas pengelolaan anggaran menjadi faktor yang lebih menentukan dibandingkan besarnya anggaran itu sendiri.

Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah kabupaten/kota yang masih menunjukkan indikasi inefisiensi, terutama Kota Padang, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, dan Kota Solok, perlu melakukan

peninjauan kembali terhadap alokasi belanja jasa, belanja pemeliharaan, dan khususnya belanja perjalanan dinas yang menjadi sumber utama ketidakefisienan. Pada komponen belanja jasa, efisiensi dapat dilakukan melalui evaluasi penggunaan tenaga pendukung, jasa konsultasi, sewa fasilitas, dan layanan pendukung lainnya agar lebih disesuaikan dengan kebutuhan riil setiap tahapan pemilu. Pada komponen belanja pemeliharaan, penghematan dapat dilakukan dengan menerapkan pemeliharaan yang lebih terencana dan berbasis prioritas, sehingga anggaran hanya difokuskan pada sarana dan prasarana yang benar-benar mendukung penyelenggaraan pemilu. Sementara itu, pengendalian belanja perjalanan dinas dapat dilakukan melalui optimalisasi koordinasi secara daring, penggabungan agenda kegiatan lapangan, serta penyesuaian frekuensi perjalanan dengan kebutuhan operasional yang nyata. Selain itu, daerah-daerah tersebut perlu melakukan benchmarking terhadap kabupaten/kota yang telah mencapai efisiensi 100% untuk mengidentifikasi praktik pengelolaan anggaran yang lebih efektif. Dengan langkah tersebut, anggaran yang selama ini terindikasi tidak efisien dapat dialihkan untuk kegiatan yang lebih berdampak langsung terhadap peningkatan partisipasi masyarakat, seperti sosialisasi kepemiluan, pendidikan pemilih, peningkatan akses informasi pemilu, serta pelayanan kepada kelompok pemilih rentan dan wilayah dengan tingkat partisipasi yang masih rendah.

Daftar Pustaka

- Afonso, A., & Fraga, G. B. (2024). Government spending efficiency in Latin America. *Empirica*, 51(1), 127–160. <https://doi.org/10.1007/s10663-023-09599-4>
- Coelli, T. J., Rao, D. S. P., & Battese, G. E. (2005). *An introduction to efficiency and productivity analysis* (2nd ed.). Springer.
- Dutu, R., & Sicari, P. (2020). Public spending efficiency in the oecd: Benchmarking health care, education, and general administration. *Review of Economic Perspectives*, 20(3), 253–280. <https://doi.org/10.2478/revecp-2020-0013>
- Hartono, H., Guntur, S., Ariadi, A., Sandi, W. N., & Aulia, B. (2023). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan PKPU No. 03 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi Kabupaten Konawe). *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(3), 7972–7981. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i3.2751>
- Hayati, N. N. (2020). Manajemen Logistik Dan Relevansinya Dengan Integritas Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Kasus Di Provinsi Jawa Barat). *Electoral Research: Riset Kepemiluan Indonesia*.
- Ofis Rikardo. (2020). Penerapan Kedaulatan Rakyat Di Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(1), 51–71. <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i1.228>

- Pardede, M. E. D. (2025). Evaluasi Efisiensi Penggunaan Anggaran Pengendalian Inflasi: Analisis Menggunakan *Data Envelopment Analysis* (DEA). *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 6. <https://doi.org/10.33105/jmp.v6i2.571>
- Putra, Z., Muzakir, & Hasan, I. (2018). Measuring The Performance Of Regional Government: Using *Data Envelopment Analysis* (DEA) Approach. *AFEBI Management and Business Review (AMBR)*, 3(2), 24–36. <https://doi.org/10.47312/ambr.v3i2.198>
- Rahayu, W. S., & Khoirunurrofik. (2022). The Effect of Accountability on the Efficiency of Local Government Expenditures. *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 177–198. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v8i2.647>
- Rahmawati, I., & Muhsyaf, S. A. (2025). Analisis Efisiensi Pengeluaran Anggaran Belanja Bidang Kesehatan dan Pendidikan Metode DEA 2021-2023. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 6(2), 395–405. <https://doi.org/10.55681/jige.v6i2.3782>
- Rambe, R. A. (2020). Inefisiensi Belanja Pemerintah Daerah Di Indonesia: Pendekatan DEA dan Regresi Logit. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(4), 311–324. <https://doi.org/10.33105/itrev.v5i4.175>
- Rambe, R. A., Wibowo, K., Febriani, R. E., & Septriani. (2020). Assessing Local Government Efficiency: Evidence from Sumatra, Indonesia. *Applied Economics Journal*, 27(2), 20–44. <https://doi.org/10.22004/ag.econ.334397>
- Risdiyanti, F. D., & Firdarini, K. C. (2026). Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja Modal Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2019-2024: Pendekatan *Data Envelopment Analysis* (DEA). *UTILITY: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Ekonomi*, 10, 28–39. <http://journal.unuha.ac.id/index.php/utility>
- Saputra, A., & Khoirunurrofik. (2022). Bagaimana Meningkatkan Efisiensi Belanja Daerah? Studi Kasus Bidang Pendidikan. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 4, 265–273. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1S.1910>
- Wijayanti, S. N. (2024). Pilkada Serentak 2020: Evaluasi Partisipasi Pemilih Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Hukum Progresif*, 12(2), 78–93. <https://doi.org/10.14710/jhp.12.2.78-93>



**Kementerian Keuangan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Sumatera Barat**



Phone
(0751) 7054731



Email
kanwildjpbsumbar@gmail.com



Office
Jl. Khatib Sulaiman No 3, Padang



Website
djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sumbar/id/



Instagram
djpbsumbar